

**USULAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INTERNAL DOSEN**



**PELATIHAN KETERAMPILAN DAN
ETIKA PELAYANAN PUBLIK
PADA POLRES BOJONEGORO**

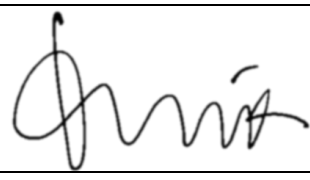
**Tim Pengusul:
Ahmad Taufiq, M.Si**

*Dibiayai oleh:
Universitas Bojonegoro
Periode 1 Tahun Anggaran 2024/2025*

UNIVERSITAS BOJONEGORO

2025

HALAMAN PENGESAHAN
PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PENDANAAN
PERGURUAN TINGGI

1.	Judul Pengabdian	:	Pelatihan Keterampilan dan Etika Pelayanan Publik pada Polres Bojonegoro
2.	Ketua		
	a. Nama	:	Ahmad Taufiq, M.Si
	b. NIDN	:	0705127404
	c. Program Studi	:	Administrasi Publik
	d. E-mail	:	taufiq.alfazka@gmail.com
	e. Bidang Keilmuan	:	Pendidikan politik, pemberdayaan sosial
3.	Anggota 1		
	a. Nama (Dosen)	:	Dra. Sri Kasiami, M.Si
	b. NIDN/NIM	:	0718056802
	c. Program Studi	:	Administrasi Publik
	d. E-mail	:	sri_kasiami@gmail.com
	e. Bidang Keilmuan	:	Pemberdayaan Masyarakat
	Anggota 2		
	a. Nama (Mahasiswa)	:	Fajar Ulinuha
	b. NIM	:	22632011060
	c. Program Studi	:	Administrasi Publik
	d. E-mail	:	Fajar.ulnuha@gmail.com
	e. Bidang Keilmuan	:	Pemberdayaan Masyarakat
4.	Jangka Waktu Pengabdian	:	3 (Tiga) Bulan
6.	Lokasi Pengabdian	:	Di Kecamatan Bojonegoro
7.	Dana Diusulkan	:	Rp 2.000.000,-
Mengetahui,			Bojonegoro, 07 Mei 2025
Ketua LPPM Universitas Bojonegoro			Pengusul,
			
<u>Laily Agustina Rahmawati, S.Si, M.Sc.</u> NIDN 07 2108 8601			<u>Ahmad Taufiq, M.Si</u> NIDN. 0705127404

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Proposal Pengabdian Masyarakat ini dengan sebaik-baiknya.

Proposal pengabdian untuk masyarakat ini berjudul *Pelatihan Keterampilan dan Etika Pelayanan Publik pada Polres Bojonegoro*. Proposal ini disusun untuk memenuhi salah satu Tridarma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat.

Kami menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa pengabdian masyarakat sampai pembuatan proposal ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam pembuatan proposal pengabdian kepada masyarakat ini.

Akhir kata, kami berharap semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga pengabdian masyarakat ini membawa manfaat bagi semua belah pihak.

Bojonegoro, 07 Mei 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
RINGKASAN.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Isu dan Fokus Pengabdian	1
1.2 Lokasi Pendampingan	3
BAB II SOLUSI PERMASALAHAN	4
2.1 Solusi Permasalahan Pendampingan.....	4
2.2 Riset Terdahulu dan Teori Yang Relevan	4
BAB III METODE PELAKSANAAN.....	7
3.1 Teknik Pendampingan.....	7
3.2 Strategi Yang Digunakan.....	8
3.3 Tahapan Kegiatan.....	8
BAB IV LUARAN DAN TARGET CAPAIAN.....	10
4.1 Luaran Pendampingan.....	10
4.2 Target Capaian	11
BAB V JADWAL DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA.....	12
5.1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan	12
5.2 Rencana Anggaran Biaya	12
DAFTAR PUSTAKA.....	13

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Justifikasi kegiatan yang akan diusulkan.	4
Table 4.1 Jenis Luaran dari Solusi Yang ditawarkan beserta Indikatornya	10
Table 4.2 Rencana Luaran	11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Teknik Pendampingan PKM	7
Gambar 3.2 Strategi dalam mencapai solusi untuk mengatasi permasalahan Mitra	8
Gambar 3.3 Tahapan kegiatan PKM	9

RINGKASAN

Pelayanan publik bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, membangun hubungan positif antara pemerintah dan warga negara, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Polri adalah salah satu lembaga penegak hukum, Kepolisian bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi hak-hak asasi manusia, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Perbaikan kualitas pelayanan publik sangat diperlukan, mengingat kondisi sosial masyarakat yang semakin membaik, sehingga dapat merespon setiap penyimpangan dalam pelayanan publik melalui berbagai gerakan atau tuntutan di media cetak maupun elektronik. Melalui pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat, citra instansi akan banyak dinilai oleh masyarakat. Kualitas layanan yang baik akan menciptakan citra positif dari instansi pemerintah di mata masyarakat.

Untuk itu, diperlukan Pelatihan Keterampilan dan Etika Pelayanan Publik pada aparaturnya Polres Bojonegoro guna memberikan mendukung lahirnya aparaturnya pelayanan publik yang sesuai dengan regulasi dan memberikan kepuasan kepada masyarakat. Dengan adanya pelayanan yang berkualitas tinggi diharapkan akan terbentuk pandangan positif dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Polres. Sehingga, pelayanan publik yang diberikan mampu mewujudkan pelayanan yang mudah, terjangkau, cepat, efisien, dan efektif.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Isu dan Fokus Pengabdian

Perkembangan peradaban manusia serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kian pesat, mendorong pemerintah lebih bekerja ekstra dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan rakyatnya. Persoalan yang dihadapi semakin hari semakin kompleks serta menuntut penyelesaian yang cepat dan tepat. Keberadaan lembaga kepolisian memiliki posisi strategis dan menentukan terwujudnya suasana kehidupan bernegara yang kondusif, aman dan terkendali. Oleh karena itu, kode etik profesi memainkan peran penting dalam mewujudkan profesionalisme polisi. Kapolri telah merilis sejumlah kebijakan guna meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Peran penting kepolisian dalam memberikan pengayoman dan pengamanan menuntut pelayanan yang optimal dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat, dengan tujuan menciptakan pelayanan kepolisian yang unggul (Syuhada & Kusmayadi, 2024).

Pelayanan publik bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, membangun hubungan positif antara pemerintah dan warga negara, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Polri adalah salah satu lembaga penegak hukum, Kepolisian bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta melindungi hak-hak asasi manusia. Landasan yuridis lembaga Kepolisian Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002. Didalam Pasal 2 disebutkan bahwa, “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi HAM.

Di Indonesia, perilaku pelayanan masyarakat oleh aparat pemerintah dipenuhi dengan masalah, seperti proses pelayanan yang berbelit-belit, ketidakpastian dalam durasi dan biaya yang membuat pelayanan menjadi sulit diakses dengan baik oleh warga. Situasi ini membuat masyarakat kehilangan kepercayaan kepada penyedia layanan, dalam hal ini birokrasi, sehingga mereka mencari solusi lain untuk mendapatkan pelayanan dengan cara tertentu, yaitu dengan memberikan uang tambahan atau mencari metode yang melanggar aturan (Arum. P.S et al., 2023; Bisri & Asmoro, 2019).

Menurut Lewis dan Gilman yang dikutip oleh Alfandi pada tahun 2021, pelayanan publik merupakan suatu bentuk kepercayaan dari masyarakat. Warga negara memiliki harapan agar pelayanan publik bisa dilakukan dengan jujur dan pengelolaan pendapatan secara akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada warga. Ini berarti bahwa pelayanan publik erat kaitannya dengan kepentingan bersama, yang merupakan dasar dari istilah pelayanan publik, sebagaimana telah dijelaskan oleh para ahli. Dengan demikian, pelayanan publik dipahami sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh birokrasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menggunakan layanan tersebut (Susilowati et al., 2025).

Perbaikan kualitas pelayanan publik sangat diperlukan, mengingat kondisi sosial masyarakat yang semakin membaik, sehingga dapat merespon setiap penyimpangan dalam pelayanan publik melalui berbagai gerakan atau tuntutan di media cetak maupun elektronik. Melalui pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat, citra instansi akan banyak dinilai oleh masyarakat. Kualitas layanan yang baik akan menciptakan citra positif dari instansi pemerintah di mata masyarakat. (Alfandi, 2021; Arum. P.S et al., 2023; Marlinda et al., 2020)

Selain itu, pelayanan publik juga harus responsif terhadap berbagai kepentingan dan nilai-nilai publik. Walaupun dalam kenyataannya masih ditemui beberapa masalah dalam pelayanan publik di Indonesia seperti banyak *illegal payment*, ketidakpastian waktu penyelesaian dan sebagainya (Semil, 2018); (Wulan et al., 2022). Untuk dapat melaksanakan tujuan tersebut diperlukan sumber daya manusia yang bermutu dan profesional sehingga pemerintah harus berupaya agar

aparaturnya yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat bekerja secara optimal dan profesional (Sucipto et al., 2019); (Nuzuli, 2023).

Untuk itu, diperlukan Pelatihan Keterampilan dan Etika Pelayanan Publik pada aparatur Polres Bojonegoro guna memberikan mendukung lahirnya aparatur pelayanan publik yang sesuai dengan regulasi dan memberikan kepuasan kepada masyarakat. Dengan adanya pelayanan yang berkualitas tinggi diharapkan akan terbentuk pandangan positif dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Polres. Sehingga, pelayanan publik yang diberikan mampu mewujudkan pelayanan yang mudah, terjangkau, cepat, efisien, dan efektif.

1.2 Lokasi Pendampingan

Mitra kegiatan Pengabdian Masyarakat ini adalah Polres Bojonegoro, yang beralamatkan di Jalan MH Thamrin, Bojonegoro. Berdasarkan hasil analisis situasi muncul permasalahan yang perlu diselesaikan berkaitan dengan rencana kegiatan pengabdian pada masyarakat adalah sebagai berikut;

Pertama, pemahaman terhadap skill dan etika pelayanan publik pada aparat Polres Bojonegoro sebenarnya sudah cukup baik. Karena, setiap tahun Polres Bojonegoro senantiasa menyelenggarakan pelatihan atau peningkatan kapasitas yang bertujuan untuk peningkatan kemampuan personel. Namun, mengingat besarnya jumlah aparat, pelatihan dilaksanakan secara bertahap dan bergiliran.

Kedua, masih adanya pengaduan dari masyarakat sehubungan dengan masih terjadinya pelayanan publik yang kurang memuaskan. Sehingga, Pimpinan Polres Bojonegoro menjadikan Pelatihan Keterampilan dan Etika Pelayanan Publik ini sebagai agenda tahunan, dengan harapan semua aparatur Polres Bojonegoro memiliki kemampuan yang sama dalam pelaksanaan etika pelayanan publik.

BAB II

SOLUSI PERMASALAHAN

2.1 Solusi Permasalahan Pendampingan

Adapun persoalan prioritas mitra yang harus dicari solusinya selama pelaksanaan Pelatihan Keterampilan dan Etika Pelayanan Publik pada aparatur Polres Bojonegoro adalah seperti pada Tabel 2.1

Tabel 2. 1 Justifikasi kegiatan yang akan diusulkan

Permasalahan	Solusi Yang Ditawarkan
Pemahaman terhadap etika yang perlu dimiliki oleh aparatur Polres Bojonegoro dalam memberikan pelayanan publik sudah ada, namun belum memadai, mengingat banyaknya personel yang dimiliki oleh Polres Bojonegoro, selaku pemberi layanan; masih belum optimalnya penerapan skill atau keterampilan dalam memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien kepada masyarakat selaku pengguna pelayanan publik.	Pelatihan Keterampilan dan Etika Pelayanan Publik pada aparatur Polres Bojonegoro

2.2 Riset Terdahulu dan Teori Yang Relevan

Beberapa penelitian untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat sehingga pengabdian yang dilakukan relevan terhadap perkembangan keilmuan. Negara adalah sebuah perkumpulan manusia (masyarakat) yang berada di satu wilayah. Untuk mengatur dan menjalankan negara, maka diperlukan pemerintahan yang memiliki tugas mengelola sumber daya ekstraktif yang dimiliki. Luasnya

wilayah serta banyaknya jumlah penduduk menuntut pemerintah bekerja secara maksimal memberikan pelayanan kepada seluruh warganya tanpa kecuali, sebagaimana amanat pembukaan UUD 1945, yaitu negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh sebab itu maka, diperlukan institusi yang secara khusus bekerja pada aspek perlindungan baik secara fisik maupun yang berhubungan dengan hak-hak keperdataan setiap orang. Salah satu alat kelengkapan negara yang bertugas dalam hal itu adalah kepolisian atau sering disebut Polisi Republik Indonesia (POLRI). Polisi memiliki fungsi serta tugas utamanya adalah, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 UU No. 2 tahun 2002). Berkaitan dengan itu, maka bagi setiap anggota polisi diwajibkan memiliki keterampilan maupun etika agar dapat menjalankan tugasnya secara optimal sehingga dapat menghasilkan kepuasan bagi seluruh masyarakat yang dilayaninya (Syuhada & Kusmayadi, 2024).

Di sisi lain, kualitas layanan yang ditunjukkan melalui tingkah laku aparat kepolisian akan menjadi faktor penentu dalam pandangan masyarakat. . Fokus utama yang perlu diperhatikan adalah kemampuan berkomunikasi dari anggota kepolisian serta mutu layanan kepada masyarakat yang mesti ditingkatkan. Penggunaan platform media sosial harus ditingkatkan agar informasi dapat disampaikan kepada masyarakat dengan lebih cepat dan jelas. Peningkatan kapasitas anggota kepolisian di Polres harus digenjot melalui peningkatan pemahaman komunikasi, sehingga mereka dapat berinteraksi secara efektif dengan masyarakat, khususnya pengguna layanan kepolisian dalam aktivitas sehari-hari. Polres juga harus melakukan perbandingan dengan instansi lain untuk memperbaiki kualitas layanan, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip tugas dan kewenangan yang telah diatur oleh hukum. Oleh karena itu, dengan memperbaiki cara berkomunikasi yang sebelumnya kurang baik dan tidak responsif, pelayanan yang berlandaskan pada prinsip Melindungi, Mengayomi, dan Melayani dapat terwujud dan dirasakan oleh masyarakat (Susilowati et al., 2025).

Studi lain menunjukkan, dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai bagian dari institusi Kepolisian, Polres telah menjalankan perannya sebagai pelayan publik dengan terus melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas pelayanan. Dari indikator keandalan, Polres dituntut profesional tidak hanya menguasai bidang tugasnya namun juga bidang lainnya untuk antisipasi kondisi mendesak. Selain itu terdapat sistem pelaporan kerja yang berkala melalui sistem maupun manual. Dari indikator daya tanggap, Polres melakukan inovasi kebijakan one day service untuk layanan seperti SKCK dan untuk laporan kasus kepolisian juga dapat datang ke lokasi kejadian setelah masyarakat menghubungi melalui call center. Untuk indikator jaminan, Polres mengusahakan semaksimal mungkin untuk pemberian layanan dilakukan adil dan tidak diskriminatif (Wulan et al., 2022).

Penelitian terkait lainnya menunjukkan, penurunan indeks kepercayaan masyarakat terhadap Polri membuat Kepolisian RI harus berbenah dan memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Salah satu aspek pelayanan publik adalah keterampilan dan etika aparat dalam komunikasi pelayanan publik. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pelatihan dengan tujuan optimalisasi keterampilan dan etika pelayanan publik melalui public speaking. Karena salah satu aspek utama dalam pelayanan publik yang prima adalah kemampuan public speaking yang baik. Pelatihan ini menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan aparat mengenai keterampilan dan etika aparat dalam komunikasi pelayanan publik (Nuzuli, 2023); (Sucipto et al., 2019).

Berdasarkan literatur review sebagai tersebut di atas, maka Pelatihan Keterampilan dan Etika Pelayanan Publik pada aparat Polres Bojonegoro akan dapat meningkatkan keterampilan dan etika aparat Polres Bojonegoro dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Sehingga, diharapkan pelayanan semakin efektif, efisien, dan memuaskan.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

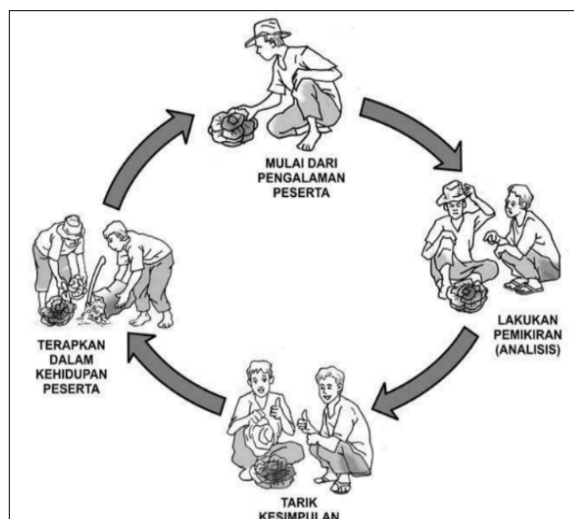
3.1 Teknik Pendampingan

Proses Pelatihan Keterampilan dan Etika Pelayanan Publik pada aparaturnya Polres Bojonegoro dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Pelatihan Keterampilan dan Etika Pelayanan Publik dilakukan melalui kegiatan pembelajaran bersama dengan membentuk forum yang bersifat formal dan nonformal. Pemateri dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang berasal dari civitas akademik Universitas Bojonegoro.

Sementara Polres Bojonegoro merupakan instansi aparat penegak hukum di tingkat kabupaten, yang memiliki jaringan hingga Polsek (kecamatan) dan tingkat desa atau Babinkamtibmas, menjadi mitra dan audiens, yang menjadi sasaran PKM atau pelatihan yang diselenggarakan civitas akademik Universitas Bojonegoro.

Praktik Pelatihan Keterampilan dan Etika Pelayanan Publik pada aparaturnya Polres Bojonegoro dilakukan secara bersama-sama dengan dipandu dari tim pemateri. Gambar 3.1 merupakan Teknik pendampingan yang akan dilakukan.

Gambar 3.1 Teknik Pendampingan PKM



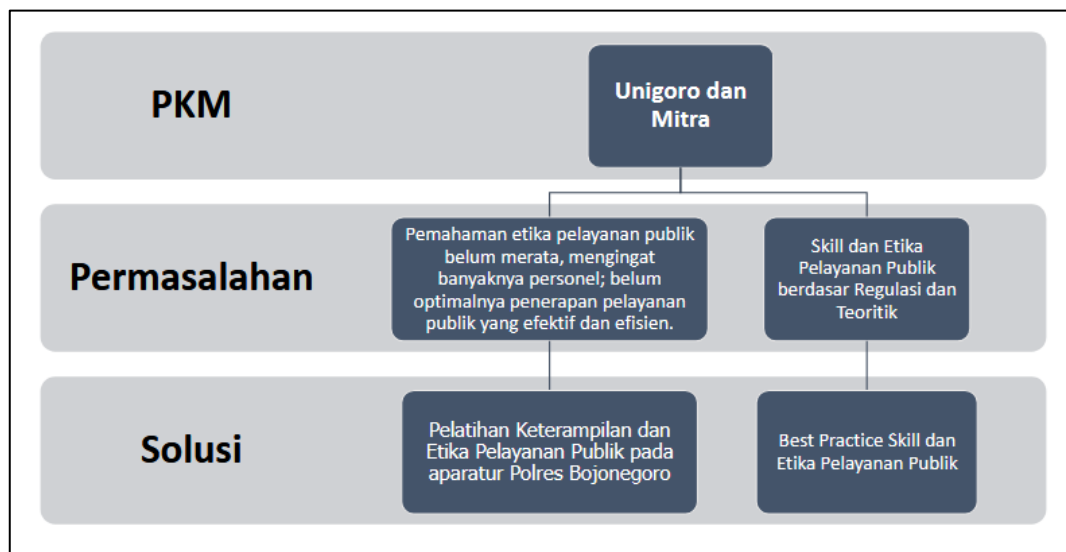
Sumber: Agus Niamilah dkk (2021)

3.2 Strategi Yang Digunakan

Strategi yang digunakan dalam melakukan pendampingan kepada mitra dijelaskan pada Gambar 3.2 diagram strategi dalam mencapai solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi Masyarakat, khususnya oleh aparaturnya Polres Bojonegoro yang merupakan agen pemberi layanan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Bojonegoro.

Dalam kegiatan ini, mitra akan berpartisipasi aktif sebagai peserta dalam semua kegiatan yang akan direncanakan dalam PKM yang telah di rencanakan, sebagaimana dalam gambar Gambar 3.2 berikut.

Gambar 3.2 Diagram Strategi dalam Mencapai Solusi untuk Mengatasi Permasalahan Mitra



3.3 Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan PKM dijelaskan pada gambar 3.3 dimana rencana evaluasi pelaksanaan program akan dilaksanakan setiap kegiatan yang telah diprogram dan direncanakan. Sedangkan untuk keberlanjutan program akan dilakukan monitoring setiap satu bulan sekali setelah program ini selesai

dilaksanakan dengan mencatat semua kendala dan permasalahan yang terjadi pada mitra sehingga program ini dapat berkelanjutan dan dapat sesuai target utama yaitu pengembangan masyarakat Bojonegoro.

Gambar 3.3 Tahapan Kegiatan PKM



BAB IV LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

4.1 Luaran Pendampingan

Table 4.1 Jenis Luaran dari Solusi Yang Ditawarkan Beserta Indikatornya

Permasalahan	Jenis Luaran	Indikator keberhasilan
Keterampilan dan penerapan etika pelayanan publik aparaturnya Polres Bojonegoro, baik yang berada di Polres maupun di tingkat kecamatan (Polsek) yang masih belum optimal	Best Practice yang berisikan langkah-langkah dalam mewujudkan pelayanan publik yang etik dan memuaskan pengguna layanan (masyarakat)	Tumbuhnya kesadaran dalam diri aparaturnya Polres Bojonegoro dan Polsek jajaran untuk meningkatkan kapasitas diri, dalam memberikan pelayanan publik yang memuaskan. Kesadaran ini ditunjukkan dengan menerapkan hasil pelatihan dalam aktivitas pelayanan. Hasil dari mengikuti pelatihan skill dan etika pelayanan publik kemudian dipraktikkan saat aparaturnya kepolisian melakukan aktivitas pelayanan publik di masyarakat.

Targetnya luaran secara umum program ini adalah lahirnya Best Practice yang berisikan langkah-langkah dalam mewujudkan pelayanan publik yang etik dan memuaskan pengguna layanan (masyarakat). Target luaran itu akan tercapai, dengan indikator awal tumbuhnya kesadaran dalam diri aparaturnya Polres Bojonegoro dan Polsek jajaran untuk meningkatkan kapasitas diri, dalam memberikan pelayanan publik yang memuaskan. Kesadaran ini ditunjukkan dengan menerapkan hasil pelatihan dalam aktivitas pelayanan. Hasil dari mengikuti pelatihan skill dan etika pelayanan publik kemudian dipraktikkan saat aparaturnya kepolisian melakukan aktivitas pelayanan publik di masyarakat.

4.2 Target Capaian

Luaran yang ditargetkan dalam Pengabdian kepada Masyarakat yang ditargetkan adalah:

Table 4.2 Rencana Luaran

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1	Publikasi ilmiah di jurnal Nasional Terakreditasi sinta minimal 5-6	Published
2	Seminar Nasional	pemakalah
3	Bahan Ajar	
4	Luaran lainnya jika ada (Teknologi tepat guna, model, desain)	

BAB V

JADWAL DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA

5.1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Adapun pengabdian kepada masyarakat ini direncanakan dapat terealisasi dalam waktu 6 (Enam) bulan sebagaimana diuraikan berikut berikut:

Tabel 5. 1 Jadwal Pengabdian kepada Masyarakat

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan Program Kerja & Koordinasi Kegiatan	v											
2	Studi literatur dan Data sekunder	v											
3	Pelatihan Keterampilan dan Etika Pelayanan Publik pada aparaturnya Polres Bojonegoro		v	v	v								
4	Kegiatan Pendahuluan					v							
5	Kegiatan Persiapan Pelatihan							v					
6	Praktek pemberdayaan di sasaran							v	v				
7	Evaluasi Kegiatan					v	v	v	v	v			
8	Publikasi Luaran											v	
9	Laporan Akhir												v

5.2 Rencana Anggaran Biaya

Adapun Rencana Anggaran Biaya (RAB) pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 2 Rencana Anggaran Biaya

No.	KOMPONEN	ITEM	SATUAN	VOLUME	HARGA	TOTAL
1	ATK	Kertas A4	RIM	1	Rp 50,000	Rp 50,000
2	ATK	Fotocopy	Paket	1	Rp 100,000	Rp 100,000
3	Konsumsi pelatihan	Snack dan makan	Paket	1	Rp 1.000,000	Rp 1.000,000
4	Banner	Banner	Paket	1	Rp 150,000	Rp 150,000
5	Plakat	Plakat	Paket	1	Rp 100,000	Rp 100,000
6	Persewaan	Sewa LCD	Paket	1	Rp 100,000	Rp 100,000
7	Biaya Publikasi	Publikasi Jurnal	Paket	1	Rp 500,000	Rp 500,000
GRAND TOTAL						Rp 2,000,000

DAFTAR PUSTAKA

- Alfandi. (2021). PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA MENANGANI PENGADUAN MASYARAKAT PADA KANTOR POLSEK LIMA PULUH KOTA PEKANBARU. *Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis*, 3(2). <https://doi.org/10.36917/japabis.v3i2.47>
- Arum. P.S, N., Sarifah, J., & Musafa Fawaz, D. (2023). Etika dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(2).
- Bisri, M. H., & Asmoro, B. T. (2019). Etika Pelayanan Publik di Indonesia. *Journal of Governance Innovation*, 1(1). <https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.298>
- Marlinda, P., Anggraini, R., & Hernimawati. (2020). Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepolisian Dalam Upaya Menangani Pengaduan Masyarakat Pada Kantor POLSEK Lima Puluh Kota Pekanbaru. *Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis*, 2(2). <https://doi.org/10.36917/japabis.v2i2.27>
- Nuzuli, A. K. (2023). *Optimalisasi Keterampilan dan Etika Pelayanan Publik bagi Anggota Kepolisian Resort Kerinci melalui Pelatihan Public Speaking*. <http://jurnalapjiki.org/>
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Semil, Nurmah. 2018. Pelayanan Prima Instansi Pemerintah: Kajian Kritis pada Sistem Pelayanan Publik di Indonesia.
- Sucipto, A., Remmang, H., & Saleh, H. (2019). Indonesian Journal of Business and Management PENGARUH ETIKA PEGAWAI, PELAYANAN PUBLIK DAN REFORMASI BIROKRASI TERHADAP PENERAPAN ZONA INTEGRITAS PADA LAPAS MAKASSAR. *Idn. J. of Business and Management*, 2(1), 13–15. <https://postgraduate.universitاسbosowa.ac.id/>
- Susilowati, T., Hartati, S., & Bakti Nusantara Lampung, I. (2025). SOCIALIZATION OF COMMUNICATION ETHICS AND PUBLIC SERVICE FOR TANGGAMUS POLICE PERSONNEL. *Jurnal PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 3(1).
- Syuhada, O., & Kusmayadi, D. (2024). Pelatihan Keterampilan Dan Etika Pelayanan Publik Bagi Anggota Polri. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(4), 2763–2768. <https://doi.org/10.31949/jb.v5i4.8729>
- UU No 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Wulan, D. O., Wismaningtyas, T. A., Damayanti, A., & Larasati, A. (2022). Analisis Kualitas Pelayanan Publik Di Kepolisian Resor (Polres) Magelang Kota. *Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 134(2), 134–138. <http://ojs.stiami.ac.id>